



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDRIO HIMAWAN WAHYU AJI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **776138**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.080.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 38 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 20.5 m2/20.5 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/145 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 285.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
2. MOTOR, HONDA NOVA Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 72.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 309.695.270**F. HARTA LAINNYA** Rp. 51.000.000

Sub Total Rp. 4.797.695.270

III. HUTANG Rp. 1.919.602.087**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.878.093.183

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.